

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dedi Mulyadi merupakan sosok yang sedang mendapatkan perhatian masyarakat, baik ketika menjadi Bupati Purwakarta yang dijabatnya selama dua periode berturut-turut, kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, maupun saat ini setelah menjadi Gubernur Jawa Barat, salah satunya dengan kebijakannya yang dinilai kontroversial, yakni rencana memasukkan anak-anak muda yang dianggap “liar” atau memiliki masalah perilaku ke dalam barak militer untuk dididik dan digembleng. Kebijakan ini memunculkan beragam tanggapan di ruang publik, mulai dari dukungan yang menilai langkah tersebut sebagai upaya mendisiplinkan generasi muda, hingga kritik yang menilai pendekatan tersebut terlalu represif dan berpotensi melanggar hak anak. Perdebatan ini menjadi menarik karena tidak hanya menyangkut persoalan kebijakan publik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana media membingkai wacana tentang moralitas, disiplin, dan masa depan generasi muda di tengah dinamika sosial masyarakat.

Kebijakan tersebut sontak menjadi sorotan berbagai media, termasuk media daring seperti Antara News, yang merupakan kantor berita resmi milik negara (ANTARA News, 2025). Selama ini, banyak media yang memberitakan tentang militer sebagai sesuatu yang menakutkan, bahkan identik dengan perang, kudeta, dan otoriter. Framing atau pembingkai media terhadap kebijakan ini sangat memengaruhi bagaimana masyarakat menilai relevansi, urgensi, dan moralitas kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, peran media online tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor wacana yang memiliki kekuatan untuk membentuk makna sosial atas kebijakan publik melalui pilihan kata, narasi visual, hingga struktur penyajian berita.

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh kepala daerah kerap kali memunculkan berbagai reaksi di tengah masyarakat, baik dari sisi dukungan maupun kritik. Reaksi tersebut mencerminkan bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterima, atau bahkan dipertanyakan oleh berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan, nilai, dan perspektif yang berbeda-beda terhadap isu yang diatur.

Kebijakan tersebut diawali dari keprihatinan terhadap kondisi generasi muda di wilayah Jawa Barat yang dinilai mengalami degradasi moral dan perilaku, ditandai dengan meningkatnya kecanduan terhadap *game online*, konsumsi rokok, alkohol, serta keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Gubernur Dedi Mulyadi melihat fenomena ini sebagai ancaman serius bagi masa depan bangsa, sehingga menggagas pembangunan barak ala militer sebagai solusi pembinaan karakter, dengan harapan dapat membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang tua serta lingkungan sosial. Melalui pendekatan semi-militeristik ini, kebijakan tersebut ditujukan untuk "menyembuhkan" generasi muda dari perilaku menyimpang dengan metode yang tegas, sistematis, dan terstruktur (BBCNewsIndonesia, 2025).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas program pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap bermasalah dengan menempatkan mereka di barak militer mulai 2 Mei 2025. Program ini dirancang untuk diterapkan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan di Jawa Barat, dengan menggandeng pihak TNI dan Polri sebagai mitra pelaksana. Melalui pendekatan semi-militer, kebijakan ini bertujuan membentuk kedisiplinan dan moral generasi muda sebagai respons atas meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan remaja (Kompas.com, 2025).

Fenomena kenakalan remaja di Indonesia belakangan ini menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai data menunjukkan peningkatan signifikan dalam perilaku menyimpang, seperti kekerasan dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Menko

Polkam Budi Gunawan, dalam pernyataannya di Mabes Polri pada 5 Desember 2024, menyampaikan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, dengan jumlah pengguna narkoba sepanjang tahun 2024 mencapai sekitar 3,3 juta orang, yang sebagian besar berasal dari kelompok usia 15 hingga 24 tahun. (Arina.id, 2025).

Berdasarkan Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara konsisten di kalangan usia remaja atau pelajar. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tercatat sebesar 1,73 persen atau sekitar 3,3 juta jiwa yang didominasi oleh penyalahguna narkoba dengan kategori coba pakai atau pertama kali mencoba narkoba. Perlu menjadi catatan, faktor pemicu utamanya adalah karena tawaran dari teman sebaya dan rasa penasaran yang tinggi ingin mencoba narkoba.

Kelompok usia remaja, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Marthinus Hukom, merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terpengaruh penyalahgunaan narkoba. Remaja dengan pola perkembangan psikologi dan moralnya menjadi “sasaran empuk” para sindikat narkoba. Masa remaja adalah fase krisis karena terjadi banyak perubahan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pada masa ini, remaja cenderung labil, penuh gejolak, dan cenderung mudah terbawa arus. Kondisi krisis inilah yang dimanfaatkan oleh sindikat narkoba dengan terus memperdayai kalangan remaja dan rekan sebaya melalui narasi menyesatkan tentang narkoba. (BNN: 2024).

Untuk kasus “bullying” atau perundungan juga memprihatinkan, terlihat dari data *Goodstats* yang bersumber dari KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan lonjakan kekerasan di lingkungan pendidikan. Pada 2023, tercatat 285 kasus, dan angkanya melonjak menjadi 573 kasus pada 2024, atau naik lebih dari dua kali lipat. Sebanyak 31

persen dari kasus tersebut berkaitan langsung dengan perundungan. Data menunjukkan bahwa bentuk perundungan terbanyak adalah fisik sebesar 55,5 persen dan verbal/psikis 29,3 persen. Dilihat dari jenjang pendidikan, korban perundungan dari usia SD dan SMP cukup mendominasi, yakni masing-masing 26 persen dan 25 persen, sedangkan SMA/SMK sebesar 18,75 persen. Perundungan ini berdampak bukan hanya luka fisik, melainkan juga penurunan motivasi belajar, keengganan hadir di sekolah. Bahkan, ada yang terdorong untuk bunuh diri.

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri telah merilis data tindak pidana perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024, bahwa setidaknya sejak 1-18 November 2025 terdapat 203 korban berusia kurang dari 20 tahun, dengan komposisi perempuan 66,5 persen dan laki-laki 33,5 persen. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menduduki tiga peringkat tertinggi jumlah korban kekerasan anak, yakni 21 orang, setelah Sumatra Utara (23 orang), dan Jawa Timur paling tinggi sebanyak 24 orang. Sedangkan dari jumlah korban menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yakni Januari-18 November 2023 sebanyak 10.617 orang, kemudian naik 15 persen pada 2024 menjadi 12.216 orang, dan pada 2025 tercatat 14.512 orang, atau meningkat 18,7 persen. (Pusiknas; 2025).

Sepanjang tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima laporan pengaduan sebanyak 3.877 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah pengaduan tersebut, kekerasan pada lingkungan satuan pendidikan ada sebanyak 329 kasus, dengan tiga aduan tertinggi, yakni korban kekerasan seksual, anak korban perundungan (tanpa laporan polisi), anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kebijakan, serta anak korban pemenuhan hak fasilitas pendidikan. Sedangkan hingga Maret 2024.

KPAI sudah menerima pengaduan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebanyak 383 kasus, dan 35 persen di antaranya terjadi di lingkungan satuan pendidikan. KPAI juga mengidentifikasi pola kekerasan yang memiliki kecenderungan dilakukan dengan keroyokan, dengan melibatkan geng pelaku, dilakukan secara sadis, terbuka, dan seakan merasa bangga, tanpa malu, dan tidak takut akan akibat yang ditanggung. (ANTARA News, 2024).

Selain itu, kasus tawuran antarpelajar juga terus meningkat dari tahun ke tahun. KPAI mencatat lonjakan angka kekerasan kolektif tersebut, termasuk di Provinsi Banten, yang pada 2023 mengalami peningkatan hingga 17,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan bahwa kenakalan remaja masih menjadi masalah serius yang terus berkembang. Bahkan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus tawuran pelajar terbanyak se-Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang 2021 ada 188 desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang menjadi arena perkelahian massal antarpelajar atau mahasiswa.

Dari total kasus yang terjadi, Jawa Barat tercatat menjadi provinsi dengan lokasi kasus tawuran pelajar terbanyak, yakni terjadi di 37 desa/kelurahan, diikuti Sumatera Utara dan Maluku dengan masing-masing 15 desa/kelurahan yang mengalami kasus serupa. Banyak faktor yang menjadi penyebab perkelahian pelajar, mulai dari emosi remaja yang belum stabil, kondisi keluarga yang tidak harmonis, masalah ekonomi, sosial-budaya, ataupun lingkungan sekolah dan guru yang kurang mampu mengarahkan siswa untuk berkegiatan secara positif. (Schoolmedia News, 2022).

Dengan latar belakang situasi tersebut, tidak mengherankan jika sebagian kalangan menyambut baik kebijakan pendidikan karakter ala barak militer sebagai bentuk intervensi. Program ini dianggap sebagai upaya tegas untuk mengatasi krisis moral dan perilaku menyimpang

di kalangan remaja. Namun demikian, muncul pertanyaan mendasar: apakah pendekatan semi-militer seperti ini benar-benar merupakan solusi yang tepat? Mengingat kompleksitas penyebab kenakalan remaja, terlalu dini untuk menyimpulkan efektivitas kebijakan ini. Pendekatan yang keras dan disiplin mungkin dapat memberikan dampak jangka pendek, namun efektivitas jangka panjangnya dalam membentuk karakter dan mengatasi akar permasalahan masih perlu dikaji lebih mendalam.

Tidak hanya itu, dari kebijakan tersebut juga memunculkan berbagai pro dan kontra dari beragam kalangan. Sebagian pihak mendukung kebijakan ini karena dinilai sebagai langkah tegas untuk membina kedisiplinan dan moral generasi muda yang dinilai mulai kehilangan arah. Mereka melihat pendekatan semi militer ini sebagai Solusi atas kegagalan sistem pendidikan formal dan dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat.



Gambar 1. Statement dari Menteri Komnas HAM terhadap Kebijakan Barak Militer Gubernur Jawa Barat

Kebijakan barak militer ala Gubernur Dedi Mulyadi juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh. Salah satunya datang dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menilai

program tersebut layak diterapkan secara lebih luas, tidak hanya terbatas di Jawa Barat. Bahkan, Pigai menyarankan agar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menerbitkan regulasi khusus yang memungkinkan pelaksanaan pendidikan berkarakter berbasis militer ini diterapkan secara nasional. Menurutnya, jika program ini terbukti efektif, maka sudah seharusnya dijadikan kebijakan strategis yang menyentuh seluruh wilayah Indonesia (Kompas.com, 2025).

Di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengkritik kebijakan ini karena dianggap terlalu represif dan berpotensi melanggar hak-hak anak. Para pemerhati pendidikan, psikolog, dan aktivis hak anak menilai bahwa pendekatan militeristik tidak serta merta mampu menyelesaikan akar permasalahan sosial remaja, dan justru dikhawatirkan dapat menciptakan trauma, serta memperburuk kondisi psikologis anak yang seharusnya mendapatkan pembinaan berbasis empati, bukan hukuman keras.

KPAI Minta Program Anak Nakal Dikirim ke Barak Dihentikan Sementara

Dwi Rahmawati - detikNews

Senin, 26 Mei 2025 14:52 WIB



Wakil Ketua KPAI Jasra Putra (Dwi Rahmawati/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penempatan **anak nakal** di barak militer dihentikan sementara. Jasa

Show Ads ^

Gambar 2. Kritik KPAI terhadap kebijakan Barak militer Gubernur Jawa Barat

Dilansir dari *detiknews*, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra meminta agar kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengatur penempatan anak-anak bermasalah di barak militer dihentikan sementara waktu guna dilakukan evaluasi menyeluruh. Jasra mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan hasil pengawasan kepada pemerintah daerah, dengan rekomendasi utama agar program tersebut tidak dilanjutkan sebelum ada kajian lebih mendalam, khususnya terkait dasar hukum dan regulasinya. Dalam pernyataannya setelah rapat bersama Komisi XIII DPR pada Mei 2025, Jasra menegaskan bahwa surat edaran dari Gubernur berpotensi melanggar hak-hak anak, mengingat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dikenal istilah “anak nakal” yang dapat dijadikan dasar penempatan ke barak militer (Detik.com, 2025).

Dalam hal ini, ANTARA sebagai kantor berita resmi negara memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pendidikan barak militer yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat. Sebagai sumber informasi yang memiliki otoritas dan kredibilitas tinggi, cara ANTARA membingkai pemberitaan sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat memahami, menerima, atau menolak kebijakan tersebut. Melalui pilihan kata, narasi, serta fokus pemberitaan yang diangkat, ANTARA dapat memperkuat legitimasi kebijakan atau sebaliknya membuka ruang bagi kritik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana ANTARA mengkonstruksi wacana seputar kebijakan ini, apakah bersifat mendukung, netral, atau kritis karena hal tersebut turut mencerminkan posisi media dalam dinamika komunikasi kebijakan publik di Indonesia.

Pemberitaan media massa memiliki peran strategis dalam membentuk cara publik memahami suatu kebijakan, termasuk kebijakan “barak militer” yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat. Dalam perspektif Framing Theory, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga melakukan seleksi, penonjolan, dan penafsiran terhadap realitas. Mengacu pada pemikiran Robert

N. Entman, framing bekerja melalui proses mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, serta menawarkan solusi. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai kebijakan “barak militer” tidak dapat dipandang sebagai refleksi realitas yang objektif semata, melainkan sebagai hasil konstruksi media yang sarat dengan sudut pandang tertentu.

Dalam konteks penelitian ini, framing menjadi penting untuk mengkaji bagaimana Kantor Berita ANTARA membentuk narasi atas kebijakan tersebut. Media dapat membingkai kebijakan “barak militer” sebagai upaya pembinaan disiplin generasi muda, sebagai respons terhadap krisis moral, atau justru sebagai kebijakan yang menuai kontroversi. Pemilihan narasumber, diksi yang digunakan, serta aspek yang ditonjolkan atau diabaikan merupakan elemen-elemen framing yang berkontribusi dalam membangun makna tertentu di benak audiens. Dengan demikian, analisis framing memungkinkan peneliti untuk mengungkap kecenderungan perspektif yang dihadirkan dalam pemberitaan.

Sebagai kantor berita negara, ANTARA memiliki karakteristik yang membedakannya dari media massa swasta. ANTARA tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga memiliki mandat untuk mendukung kepentingan nasional dan pembangunan. Posisi ini membuka kemungkinan adanya kecenderungan dalam pemberitaan yang lebih selaras dengan kebijakan pemerintah atau aktor negara. Dalam konteks kebijakan “barak militer” Gubernur Jawa Barat, penting untuk melihat apakah ANTARA cenderung membangun legitimasi kebijakan, menampilkan narasi yang mendukung stabilitas, atau tetap memberikan ruang bagi kritik dan perbedaan pandangan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara kritis bagaimana framing pemberitaan ANTARA terhadap kebijakan “barak militer” dikonstruksi, sekaligus menilai sejauh mana independensi media negara dalam merepresentasikan realitas sosial. Analisis ini tidak hanya

mengungkap pola narasi yang dominan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana relasi antara media dan negara bekerja dalam praktik jurnalistik. Pada akhirnya, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran media dalam membentuk opini publik serta dinamika kekuasaan yang melingkupinya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana media ANTARA membingkai kebijakan barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pemberitaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi naratif yang dibangun oleh ANTARA, termasuk sejauh mana media ini menekankan aspek-aspek tertentu seperti urgensi kebijakan, aktor yang terlibat, respons publik, serta dimensi moral yang ditampilkan. Dengan menggunakan pendekatan analisis framing, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana media memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kebijakan publik yang kontroversial, serta menilai apakah pemberitaan yang disajikan cenderung memperkuat legitimasi kebijakan, memberikan ruang kritik, atau bersifat netral.

1.2. Perumusan Masalah

Kebijakan barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi fenomena aktual yang ramai diperbincangkan oleh publik dan mendapat pemberitaan luas di berbagai media, termasuk media ANTARA. Kenyataan ini mencerminkan realitas bahwa negara, melalui kebijakan lokal, mulai menggunakan pendekatan militeristik sebagai metode pendidikan karakter bagi remaja bermasalah. Media, dalam hal ini ANTARA sebagai kantor berita resmi negara, menjadi aktor penting dalam menyampaikan dan membingkai realitas tersebut kepada publik.

Dari sisi Das Sollen, muncul pertanyaan normatif mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh media dalam memberitakan kebijakan yang kontroversial dan berimplikasi pada hak anak.

Seharusnya, media menjalankan perannya secara objektif, kritis, dan berimbang dalam menyoroti kebijakan publik, terutama yang menyangkut kepentingan kelompok rentan seperti anak-anak. Media diharapkan tidak hanya mereproduksi narasi kekuasaan, tetapi juga memberikan ruang bagi suara alternatif, seperti pandangan dari KPAI, psikolog, atau pemerhati pendidikan, agar kebijakan tersebut dapat dilihat secara lebih komprehensif dan tidak bias.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini hendak menganalisis bagaimana framing media ANTARA terhadap kebijakan barak militer oleh Gubernur Jawa Barat dikonstruksi dalam pemberitaan, dan menjawab setidaknya tiga isu besar yang akan dilihat, yaitu:

1. Bagaimana media ANTARA mendefinisikan kebijakan barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat dalam pemberitaannya?
2. Aktor apa yang ditonjolkan dalam pemberitaan?
3. Nilai atau moral apa saja yang ditekankan dalam pemberitaan?

1.4. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis karena dapat memperkaya keilmuan pada jurusan Ilmu Komunikasi, khususnya dalam kajian analisis framing media. Dengan menggunakan konsep framing, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman mengenai bagaimana media membingkai kebijakan publik yang bersifat kontroversial, seperti kebijakan barak militer. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan teori konstruksi realitas sosial melalui media, serta menegaskan relevansi teori framing Robert N. Enmant dalam konteks pemberitaan kebijakan publik di Indonesia.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi praktisi media dan jurnalis dalam memahami dampak pemilihan bingkai berita terhadap persepsi publik. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi redaksi media, termasuk Antaranews, untuk lebih reflektif dalam menyajikan pemberitaan yang berimbang, objektif, dan bebas dari bias tertentu. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah atau pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana kebijakan mereka dikonstruksikan oleh media sehingga dapat menyusun strategi komunikasi publik yang lebih efektif.

3. Signifikansi Sosial

Secara sosial, penelitian ini penting karena dapat membantu masyarakat memahami bahwa berita tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengandung bingkai tertentu yang memengaruhi cara publik menafsirkan realitas sosial dan politik. Dengan demikian, penelitian ini mendorong peningkatan literasi media masyarakat agar lebih kritis dalam mengonsumsi berita terkait kebijakan publik. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut isu-isu strategis seperti kebijakan barak militer yang berimplikasi pada keamanan dan kehidupan sosial masyarakat Jawa Barat.

1.5. Kerangka Penelitian

1.5.1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma konstruktivisme. Dalam (Umanailo, 2018), paradigma konstruktivisme adalah kebalikan dari pandangan yang mengutamakan kontrol dan rasionalitas untuk menunjukkan realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma konstruktivisme memiliki beberapa karakteristik yang

membedakannya dari paradigma lain, khususnya dalam hal ontologi, epistemologi, dan metodologi. Pada tingkatan ontologi, paradigma konstruktivis memandang realita menjadi sesuatu yang ada, namun realitas dianggap beragam dan penafsirannya bisa bermacam-macam pada setiap individu. Dalam epistemologi, peneliti mengadopsi pendekatan subjektif untuk menjelaskan bagaimana individu membentuk makna. Paradigma konstruktivisme digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami pembingkai dari kebijakan barak militer dari Gubernur Jawa Barat yang terbilang kontroversial melalui media *Antaranews*. Paradigma konstruktivis menekankan bahwa realitas sosial dan politik dibentuk oleh interaksi sosial, nilai-nilai budaya, dan sejarah. Dalam hal ini, representasi media dianggap sebagai konstruksi sosial yang menampilkan dan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kebijakan kontroversial tersebut.

1.5.2. State of The Art

Dalam upaya memahami dinamika media dan konstruksi realitas sosial, sejumlah penelitian sebelumnya telah banyak menggunakan analisis framing sebagai pisau bedah untuk mengungkap bagaimana isu-isu tertentu dikonstruksi, disajikan, dan dimaknai oleh media.

Pertama, penelitian dengan judul *Online Climate Change Polarization: Interactional Framing Analysis of Climate Change Blog Comments*, oleh Christel W. van Eck, Bob C. Mulder, and Art Dewulf pada tahun 2020. Penelitian mengenai framing isu perubahan iklim umumnya berfokus pada bagaimana relevansi isu tersebut direkonstruksi melalui strategi reframing, namun masih sedikit yang menelaah bagaimana individu menghadapi frame yang bertentangan dengan pandangan mereka. Untuk mengisi celah ini, sebuah studi menggunakan analisis framing interaksional guna meneliti interaksi pengguna dalam komentar blog terkait perubahan iklim, dengan menekankan konstruksi makna atas

isu, identitas, hubungan, dan proses interaksi. Berlandaskan teori framing sebagai konstruksi sosial, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan framing biasanya berawal dari isu, lalu bergeser pada aspek identitas, hubungan, maupun proses, serta menunjukkan bahwa strategi interaksi yang paling dominan digunakan adalah strategi yang bersifat mempolarisasi.

Kedua, penelitian dengan judul *Drawing on borders: a large-scale framing analysis of coronavirus in early UK news maps*, oleh Johanna Meyer pada tahun 2024. Peta merupakan media unik yang menggabungkan komunikasi visual dan tekstual, dan penggunaannya sangat menonjol dalam peliputan Covid-19. Penelitian ini berangkat dari masalah representasi pandemi melalui visualisasi berita, khususnya bagaimana peta membingkai isu kesehatan global. Dengan tujuan mengkaji pola framing, studi ini melakukan analisis framing terhadap 4.398 peta terkait Covid-19 yang dipublikasikan di enam media berita Inggris pada tahap awal pandemi. Berlandaskan teori framing dalam studi media dan representasi visual, peneliti menemukan sepuluh kerangka utama, yakni Covid-19 diposisikan sebagai: (1) masalah nasional; (2) masalah regional; (3) dikaitkan dengan Tiongkok; (4) ancaman tak terdefinisi; (5) masalah medis; (6) dapat dikendalikan; (7) masalah ekonomi; (8) masalah lingkungan; (9) dapat didata (*datafiable*); dan (10) dapat diidentifikasi. Temuan menunjukkan bahwa peta yang menggunakan batas-batas nasional sebagai dasar pengorganisasian ruang merupakan yang paling umum, sering dikombinasikan dengan strategi *datafication* dan narasi ancaman virus. Hasil penelitian ini ditempatkan dalam konteks representasi penyakit menular dan peta sebagai bentuk visualisasi berita yang khas.

Ketiga, penelitian dengan judul *On the "Basketball Africa League": Framing Analysis of the Broadcast Commentary of an African Professional Basketball League*, oleh Kelsey Slater pada tahun 2023. Musim perdana Basketball Africa League (BAL) yang didukung oleh National Basketball Association (NBA) menampilkan 12 tim dari berbagai negara di benua Afrika dalam format kompetisi bergaya Liga Champions. Permasalahan yang diangkat penelitian ini berkaitan dengan bagaimana liputan media membingkai identitas dan performa atlet dalam kompetisi baru tersebut, mengingat daftar pemain diwajibkan mencakup sejumlah atlet lokal dari negara asal tim, disertai dengan tambahan beberapa pemain asing. Dengan tujuan menganalisis konstruksi media terhadap citra pemain, penelitian ini menggunakan analisis framing, di mana dua peneliti melakukan analisis terhadap siaran pertandingan BAL dengan fokus pada deskriptor seperti fisikalitas, kecerdasan, kebangsaan, dan pengalaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar deskripsi terkait dengan kesuksesan atau kegagalan atlet, dengan temuan signifikan dalam perbedaan penggunaan deskriptor antar kebangsaan. Studi ini juga memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya mengenai representasi atlet dalam konteks olahraga global.

Keempat, penelitian dengan judul *Images of China in The Australian press: time for new frames and new readings of old frames to broaden the horizons of framing analysis*, oleh Runping Zhu pada tahun 2023. Framing menjadi pusat dalam kajian tentang kekuatan persuasif pesan media, khususnya bagaimana pers menampilkan suatu isu melalui bingkai tertentu untuk menyajikan informasi sekaligus memengaruhi pandangan pembaca. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana framing media membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan luar negeri, dengan studi kasus

pemberitaan kebijakan satu anak di Tiongkok oleh media Australia. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi kontribusi tambahan pada analisis framing tradisional guna memahami dampak jurnalisme terhadap cara orang Australia memandang dunia dan dirinya sendiri. Dengan menggunakan metode studi kasus pada pemberitaan media, penelitian ini berlandaskan paradigma teori framing, namun menambahkan dua pendekatan baru: pertama, konsep *self-reflective frames* yang melekat pada frame negara lain dengan implikasi superioritas budaya Australia; kedua, pengenalan *social and cultural attributes frame* yang mengaitkan peristiwa faktual di negara lain dengan atribut sosial atau budaya masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tambahan tersebut memperkaya analisis framing tradisional dengan mengungkap dimensi representasi diri dan stereotip budaya dalam pemberitaan internasional.

Kelima, penelitian dengan judul *The view from 'My Pitch': Homeless voices in The Big Issue during the cost-of-living crisis*, oleh Steven Harkins pada tahun 2024. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana media membingkai isu kemiskinan dan tunawisma, dengan fokus pada 12 edisi majalah *The Big Issue* yang terbit dalam tiga bulan terakhir tahun 2023. Tujuannya adalah menganalisis bahasa yang digunakan majalah tersebut dalam pemberitaan, khususnya melalui kolom *My Pitch* yang menampilkan suara para penjual majalah yang sebagian besar adalah tunawisma. Menggunakan pendekatan framing dari Entman, penelitian ini menelaah bagaimana individu dengan pengalaman langsung hidup dalam kemiskinan dan tunawisma mendefinisikan penyebab serta solusi atas permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majalah ini memang memberikan ruang bagi kelompok terpinggirkan untuk menyuarakan pengalaman mereka, meskipun ruang dalam kolom *My Pitch* masih terbatas untuk menghadirkan konteks yang

lebih luas mengenai tunawisma. Selain itu, majalah cenderung memperkuat solusi berbasis *social enterprise* terhadap kemiskinan dan tunawisma, sembari menghindari pembahasan mengenai kelemahan sistem kesejahteraan sosial di Inggris. Namun demikian, narasi yang tersaji justru secara implisit menghadirkan bukti mengenai disfungsi sistem kesejahteraan tersebut.

Keenam, penelitian dengan judul *Krisis Dan Komunikasi Kepemimpinan Publik: Analisis Framing Media Sosial Kepala Daerah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*. Oleh Rahmanto, A. N., Naini, A. M. I., Priliantini, A., Hendriyani, C. T., & Anshori, M. 2022. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui upaya komunikasi yang dilakukan Ganjar Pranowo dalam menangani pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode framing. Desain penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yang dilalui, yaitu studi terhadap isi media, studi terhadap produsen isi media dan studi terhadap fenomena sosial. Hasil penelitian dalam Analisis Framing oleh Robert N. Entman adalah; 1) Definisikan Masalahnya; kesehatan fasilitas dan fasilitas; pendidikan; kebutuhan dasar masyarakat; peraturan; koordinasi; berita palsu. 2) Diagnosis Penyebab; penderita kasus dan penyebaran Covid-19; ekonomis kesulitan tidak terpenuhi; pembatasan fasilitas dan fasilitas tenaga kesehatan; perilaku dan ketaatan warga; antisipasi dan persiapan untuk yang baru normal. 3) Membuat Penilaian Moral; tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga negara; kepatuhan terhadap aturan; tanggung jawab bersama; bantuan ekonomi; mendidik pendampingan; 4) Rekomendasi pengobatan; untuk penanganan disiplin proses dan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); pemerintah memberikan fasilitas dan bantuan; gotong royong dan jogo tonggo.

1.5.3. Novelty (Kebaharuan)

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki beberapa unsur kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai analisis framing media.

Pertama, dari aspek objek penelitian, penelitian ini mengkaji konstruksi framing media terhadap kebijakan pendidikan karakter berbasis barak militer bagi siswa bermasalah, yang merupakan isu kebijakan publik di bidang pendidikan dan perlindungan anak. Sebagian besar penelitian framing sebelumnya lebih banyak mengkaji isu politik, pemilu, pandemi, lingkungan, olahraga, maupun konflik internasional, sehingga kajian mengenai pendidikan barak militer masih relatif terbatas.

Kedua, dari aspek media yang diteliti, penelitian ini menggunakan ANTARA sebagai objek penelitian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan media daring komersial, ANTARA merupakan kantor berita nasional (*news agency*) yang memiliki karakteristik sebagai produsen berita yang menjadi rujukan berbagai media di Indonesia. Posisi tersebut menjadikan ANTARA memiliki peran strategis dalam proses konstruksi informasi publik mengenai suatu kebijakan.

Ketiga, dari aspek analisis, penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi framing masing-masing berita, tetapi melakukan proses sintesis terhadap keseluruhan hasil analisis melalui *cross case analysis* sehingga menghasilkan pola framing yang dominan. Melalui proses tersebut diperoleh lima framing dominan yang menggambarkan bagaimana ANTARA mengonstruksi realitas mengenai kebijakan pendidikan barak militer.

Keempat, dari aspek konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi framing media tidak hanya dibentuk melalui pendefinisian masalah sebagaimana dijelaskan dalam model Robert N. Entman, tetapi juga dipengaruhi oleh dominasi aktor yang diberi ruang dalam pemberitaan serta nilai moral yang digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan model sintesis framing yang memperlihatkan keterkaitan antara perangkat framing Entman, aktor dominan, dan nilai moral dalam membentuk konstruksi realitas media.

Dengan berbagai unsur kebaruan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian framing media, khususnya pada analisis pemberitaan mengenai kebijakan publik yang menimbulkan perdebatan di masyarakat.

1.5.4. Konstruksi Sosial

Dalam teori sosial banyak yang menyatakan bahwa manusia bukan saja menjadi kontrol sosial, melainkan manusia merupakan agen social of changes bahwa manusia juga memiliki dasar kreatif, proaktif dan dengan kearifan internal manusia itu yang kemudian menjadikan manusia aktor penting dalam realitas sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai-nilai yang semuanya tercakup dalam fakta sosial. Manusia dapat mengembangkan diri secara kreatif melalui respons-respons stimulus pada dunia kognisinya. Dalam penjelasan ontologi paradigma konstruktivis, realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan individu. Namun demikian kebenaran sebuah realitas ialah bersifat nisbi (relative) yang berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Menurut Bungin (2008), Istilah konstruksi sosial atau realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan pertama kali oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sekitar 1996 melalui buku mereka yang berjudul: *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociological of Knowledge*. Dua ilmuwan sosiologi tersebut menggambarkan bahwa proses sosial melalui tindakan dan interaksinya. Di mana individu menciptakan secara berulang atau terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Menurutnya kembali bahwa konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan melalui tiga tahap, yakni eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi. Tiga proses ini terjadi di antara individu satu dengan yang lainnya dalam masyarakat.

Substansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckman ialah simultan yang terjadi tersebut berjalan secara ilmiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada komunitas primer dan semi-sekunder. Asas dasar teori dan pendekatan ini ialah masyarakat transmisi-modern di Amerika Serikat pada era 1960-an, di mana media massa belum menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dibicarakan.

Dengan demikian, teori konstruksi realitas sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman tidak memasukkan media sebagai variabel dalam konstruksi realitas sosial. Namun pada kenyataannya konstruksi realitas berlangsung secara lambat, membutuhkan waktu yang lama dan bersifat spasial dan berlangsung secara hierarkis-vertikal. Di mana hal ini hanya berlangsung di kalangan pemimpin kepada bawahan, kyai pada santri, guru kepada murid dan seterusnya. Pakar sosiologi menyatakan bahwa konstruksi realitas sosial hampir tidak dapat dipisahkan dengan jajaran teori-teori komunikasi massa, pada perkembangan ilmu komunikasi massa menjadi bagian dari ilmu komunikasi dengan pesatnya hingga saat ini, gagasan awal Aristoteles tentang sebagaimana berurutannya

komunikator, pesan dan penerima telah diperpanjang oleh gagasan Harold Dwight Laswell menjadi; Who, Say What, in with channel, to whom, with what effect. 2 Implikasi besar komunikasi model ini adalah jika komunikator menentukan gagasan atau pesan kemudian disiarkan kepada khalayak (audiens) melalui saluran dan keluar hasil yang diinginkan.

Bagi kalangan masyarakat khusus, media massa merupakan infrastruktur kekuasaan (power). Adapun masyarakat khusus yang dimaksud adalah pemuka masyarakat, tokoh-tokoh lain di mana mereka melihat bahwa undang-undang dan peraturan, merupakan refleksi dari keterlibatan kalangan "dominan class". Kemudian masyarakat lain (subordinate class), menghadapi media massa sebagai kontrol sosial dan perubahan. Dengan demikian jelas sekali bahwa media massa berperan penting berdasarkan kepentingan masing-masing kalangan.

Pada proses panjang perjalanan teori-teori komunikasi massa selanjutnya, sejumlah sosiolog mulai memformulasikan sebuah model teori yang disebut dengan teori konstruksi sosial yang terjadi dalam media massa sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Sehingga dalam penelitian kali ini yang merupakan penelitian terhadap media massa merasa relevansi dalam proses menelitinya menggunakan teori konstruksi realitas sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman bagi media massa. Di mana nantinya untuk membaca isu dan kasus yang tersaji pada objek penelitian dengan analisis framing diharapkan dapat menunjukkan bagaimana teori konstruksi realitas sosial dipraktikkan oleh media online *Antaranews*.

1.5.5. Media Online

Media online, yang juga dikenal dengan istilah cybermedia, internet media, atau new media, merupakan bentuk media yang disajikan melalui jaringan internet dalam format situs web. Menurut Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dari Dewan Pers,

media siber mencakup seluruh jenis media yang memanfaatkan internet untuk melakukan kegiatan jurnalistik, sekaligus memenuhi ketentuan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang berlaku.

Dalam perkembangan sejarahnya, media online dapat dianggap sebagai “generasi ketiga” setelah media cetak—seperti koran, tabloid, majalah, dan buku—serta media elektronik—seperti radio, televisi, dan film atau video. Produk jurnalistik yang disajikan secara daring ini dikenal sebagai cyber journalism, yaitu penyajian fakta atau peristiwa yang diproduksi dan disebarkan melalui internet.

Jenis media online berbasis berita dapat dibedakan menjadi lima kategori. Pertama, versi daring dari media cetak seperti Republika Online, Kompas Cyber Media, Media-Indonesia.com, Seputar-Indonesia.com, Pikiran-Rakyat.com, dan TribunJabar.co.id. Kedua, edisi online dari media radio, misalnya Radio Australia (radioaustralia.net.au) dan Radio Nederland (rnw.nl). Ketiga, edisi online dari media televisi, seperti CNN.com, MetroTVNews.com, dan Liputan6.com. Keempat, portal berita murni yang tidak berafiliasi dengan media cetak maupun penyiaran, seperti Antaranews.com, Detik.com, dan Viva News. Kelima, situs indeks berita yang hanya menampilkan tautan ke berita dari media lain, seperti Yahoo! News, Plasa.msn.com, NewsNow, dan Google News yang mengompilasi berita secara otomatis dari berbagai sumber daring.

1.6. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa pemberitaan media, khususnya Antaranews, tidak bersifat netral, melainkan dibentuk melalui proses seleksi dan penonjolan informasi sesuai dengan kerangka tertentu (frame) yang dipilih redaksi. Mengacu pada model framing Robert N. Entman, diasumsikan bahwa setiap berita akan melalui tahap define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation yang memengaruhi cara

publik memaknai kebijakan barak militer dari Gubernur Jawa Barat. Proses ini berimplikasi pada bagaimana isu tersebut dikonstruksi apakah diposisikan sebagai solusi keamanan, strategi politik, atau kebijakan kontroversial yang pada akhirnya menentukan arah opini publik.

Selaras dengan teori konstruksi realitas sosial, penelitian ini mengasumsikan bahwa realitas kebijakan barak militer tidak hadir secara objektif di ruang publik, tetapi dikonstruksi melalui interaksi antara media, pemerintah daerah, dan audiens. Media berperan sebagai aktor utama dalam membentuk “realitas kedua” (second-hand reality) yang diakses masyarakat, dengan menekankan aspek tertentu sambil mengabaikan atau mengecilkan aspek lainnya. Dalam konteks Antaranews, sebagai kantor berita negara, konstruksi realitas yang dihadirkan kemungkinan besar dipengaruhi oleh posisi dan kepentingan institusional, sehingga framing yang muncul dapat selaras atau mendukung narasi resmi pemerintah. Asumsi ini menjadi landasan bagi analisis yang menguji sejauh mana pemberitaan Antaranews membentuk persepsi publik terhadap kebijakan tersebut.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini berfokus pada penerapan model analisis framing Robert N. Entman yang mencakup empat elemen utama: (1) Define Problems bagaimana Antaranews mendeskripsikan kebijakan barak militer Gubernur Jawa Barat, apakah sebagai solusi keamanan, strategi penataan wilayah, atau isu kontroversial; (2) Diagnose Causes – siapa atau apa yang diposisikan sebagai penyebab munculnya kebijakan ini, misalnya situasi keamanan, kepentingan politik, atau instruksi pemerintah pusat; (3) Make Moral Judgement – nilai, norma, atau prinsip yang digunakan media untuk menilai kebijakan tersebut, baik secara implisit maupun eksplisit; dan (4) Treatment Recommendation – solusi atau langkah lanjutan yang disarankan atau diimplikasikan oleh media, seperti dukungan pelaksanaan, revisi kebijakan, atau penolakan.

Keempat indikator ini akan menjadi panduan dalam menganalisis teks berita yang disiarkan Antaranews terkait kebijakan tersebut.

Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka teori konstruksi realitas sosial sebagai landasan untuk melihat bagaimana berita dibentuk melalui proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu. Dalam operasionalisasinya, analisis akan memeriksa penggunaan bahasa, kutipan narasumber, konteks historis, dan penempatan informasi di dalam berita untuk mengidentifikasi konstruksi makna yang dibangun. Variabel yang diamati meliputi aktor yang dimunculkan, narasi dominan, dan keberpihakan yang tersirat dalam pemberitaan. Dengan demikian, operasionalisasi konsep ini memungkinkan peneliti untuk mengukur secara sistematis bagaimana Antaranews membingkai kebijakan barak militer Gubernur Jawa Barat dan bagaimana konstruksi tersebut dapat memengaruhi persepsi publik.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis framing Robert N. Entman, yang diharapkan mampu mengungkap bagaimana media Antaranews membingkai kebijakan barak militer oleh Gubernur Jawa Barat. Melalui analisis ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pola pemberitaan, tetapi juga mengidentifikasi elemen-elemen framing seperti pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian.

Dalam (Mulyana, 2002), Indikator framing model Robert N Entman untuk menganalisis berita ada empat sebagaimana berikut:

Pertama, Define Problems ialah merupakan langkah mengidentifikasi sudut pandang yang ditampilkan oleh media terhadap posisi media dalam pemberitaan isu

tertentu. Pada tahap ini peneliti akan melakukan identifikasi dan melihat bagaimana posisi media, posisi yang dimaksud dapat bersifat pro dan kontra terhadap isu, atau bahkan netral. Artinya, media dalam memberitakan suatu isu dapat menentukan posisinya dimana untuk dapat diidentifikasi oleh peneliti.

Kedua, Diagnose Cause adalah tahapan untuk melihat bagaimana jurnalis dalam mendiagnosa penyebab salah satu aktor utama dalam paragraf terhadap penjelasan inti berita. Pada bagian ini penelitian akan mengkaji pada naras-narasi dan ilustrasi yang sudah disajikan oleh jurnalis.

Ketiga, Make Moral Judgement merupakan proses menyusun penilaian moral dari peristiwa yang diberitakan. Setelah masalah teridentifikasi dan penyebabnya diketahui, maka selanjutnya yang akan dilakukan peneliti adalah membuat penilaian moral. Maksud dari membuat nilai moral ialah penambahan substansi yang dapat memperkuat ide-ide yang telah diutarakan dalam narasi pemberitaan tersebut.

Keempat, Treatment recommendation tahap ini adalah untuk meneliti bagaimana media memberikan saran perbaikan terhadap masalah yang diberitakan. Masalah yang diberitakan dalam isu tertentu apakah diberi saran atau alternatif penyelesaian di dalam redaksi oleh jurnalis atau jurnalis dalam media bersangkutan. Penyelesaian yang diberikan akan tergantung kepada sudut pandang masalah yang diambil karena akan mempengaruhi apa dan siapa yang menyebabkan masalah tersebut. Sehingga nantinya dalam penelitian ini pada tahap analisis interpretasi data tidak menutup kemungkinan apabila sebuah media tidak memenuhi keseluruhan indikator analisis ini.

Tabel 1.1. Konsep Struktur Framing Robert N Entman

Define Problem (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
Diagnose Causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk menjelaskan masalah? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

1.8.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berupa teks berita yang dipublikasikan oleh media Antaranews, yang membahas mengenai kebijakan barak militer bagi remaja bermasalah yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat. Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana isu tersebut dibingkai dalam pemberitaan, khususnya melalui sudut pandang redaksi, pemilihan narasi, dan konstruksi makna yang digunakan dalam penyajian berita. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana strategi framing media Antaranews

membentuk persepsi publik terhadap kebijakan tersebut, serta bagaimana nilai-nilai ideologis dan kepentingan tertentu tercermin dalam struktur wacana berita. Data penelitian berupa 20 berita yang secara khusus membahas kebijakan “barak militer” Gubernur Jawa Barat. Berita-berita tersebut dikumpulkan dalam rentang waktu April hingga Mei 2025. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada bulan tersebut isu kebijakan “barak militer” sedang berada pada fase intensitas pemberitaan yang tinggi, baik dalam bentuk pengenalan kebijakan, respons publik, maupun tanggapan dari berbagai aktor pemerintah.

Dengan demikian, periode ini dianggap representatif untuk melihat dinamika framing media secara lebih komprehensif. Adapun tema-tema yang dianalisis dalam berita tersebut meliputi: (1) representasi kebijakan (bagaimana kebijakan dijelaskan dan dibingkai), (2) aktor yang ditonjolkan (siapa yang diberi ruang dalam pemberitaan), (3) narasi dukungan dan penolakan, serta (4) implikasi kebijakan terhadap masyarakat. Tema-tema ini digunakan untuk mengidentifikasi pola framing yang dibentuk oleh media dalam mengonstruksi realitas sosial terkait kebijakan tersebut.

1.8.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa teks berita online. Data ini dianalisis bukan dari sisi kuantitas pemberitaan, melainkan isi, struktur, dan makna yang dibangun dalam teks.

1.8.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari portal berita [Antaranews.com](https://www.antaranews.com), khususnya artikel-artikel yang terbit dalam periode tertentu ketika isu kebijakan barak militer oleh Gubernur Jawa Barat muncul dan berkembang di ruang publik.

Data primer diperoleh langsung dari teks berita yang dipublikasikan di Antaranews.com, karena berita tersebut menjadi objek utama analisis framing. Sementara itu, **data sekunder** diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan yang relevan, yang digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoretis maupun faktual terhadap isu yang dikaji. Dengan memadukan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai cara media membingkai kebijakan barak militer tersebut.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan teks berita yang dipublikasikan oleh Kantor Berita ANTARA terkait kebijakan “barak militer” Gubernur Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laman resmi ANTARA News menggunakan kata kunci seperti “barak militer”, “pendidikan militer”, dan nama Gubernur Jawa Barat.

Berita yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu: (1) berita diterbitkan dalam rentang waktu April hingga Mei 2025, (2) berita secara eksplisit membahas kebijakan “barak militer”, dan (3) berita relevan dengan fokus penelitian. Dari proses tersebut diperoleh 20 berita yang selanjutnya dijadikan sebagai data utama penelitian.

Seluruh berita yang telah terpilih kemudian didokumentasikan dalam bentuk arsip digital dan diklasifikasikan berdasarkan tanggal publikasi, judul berita, serta pokok isu yang dibahas untuk memudahkan proses analisis.

Tabel 1.2 Berita Antaranews Tentang Pendidikan Barak Militer

No	Judul berita	Link berita	Tanggal penayangan berita
1.	Siswa bermasalah Jabar akan didik di barak militer mulai 2 Mei 2025	https://www.antaranews.com/berita/4797733/siswa-bermasalah-jabar-akan-dididik-di-barak-militer-mulai-2-mei-2025	27 April 2025
2.	Pemerintah kaji program pembinaan siswa ke barak militer	https://www.antaranews.com/berita/4826737/pemerintah-kaji-program-pembinaan-siswa-ke-barak-militer	10 Mei 2025
3.	Mendukbangga respons soal anak nakal dikirim ke barak militer	https://www.antaranews.com/berita/4835249/mendukbangga-respons-soal-anak-nakal-dikirim-ke-barak-militer	15 Mei 2025
4.	Dedi Mulyadi akan diskusi dengan Mendikdasmen soal pendidikan di barak	https://www.antaranews.com/berita/4822301/dedi-mulyadi-akan-diskusi-dengan-mendikdasmen-soal-pendidikan-di-barak	8 Mei 2025
5.	Pigai: Pendidikan siswa bermasalah di barak tak salah standar HAM	https://www.antaranews.com/berita/4814121/pigai-pendidikan-siswa-bermasalah-di-barak-tak-salahi-standar-ham	5 Mei 2025
6.	Disdikpora Cianjur: Pembinaan di barak dapat menekan siswa bermasalah	https://www.antaranews.com/berita/4812329/disdikpora-cianjur-pembinaan-di-barak-dapat-menekan-siswa-bermasalah	4 Mei 2025
7.	Wamendagri nilai anak bermasalah masuk ke barak perlu libatkan pakar	https://www.antaranews.com/berita/4809317/wamendagri-nilai-anak-bermasalah-masuk-ke-barak-perlu-libatkan-pakar	2 Mei 2025

8.	Bupati Karawang akan kirim pelajar SMA/SMK ke markas militer TNI	https://www.antaranews.com/berita/4823041/bupati-karawang-akan-kirim-pelajar-sma-smk-nakal-ke-markas-militer-tni	8 Mei 2025
9.	DPR setuju TNI bina siswa asal sesuai kurikulum dan tanpa kekerasan	https://www.antaranews.com/berita/4820565/dpr-setuju-tni-bina-siswa-asal-sesuai-kurikulum-dan-tanpa-kekerasan	8 Mei 2025
10.	Komnas PA ingatkan asesmen psikologis anak sebelum ke barak militer	https://www.antaranews.com/berita/4842937/komnas-pa-ingatkan-asesmen-psikologis-anak-sebelum-ke-barak-militer	19 Mei 2025
11.	Menteri HAM sebut Pendidikan di barak bisa diterapkan di seluruh RI	https://www.antaranews.com/berita/4822669/menteri-ham-sebut-pendidikan-di-barak-bisa-diterapkan-di-seluruh-ri	8 Mei 2025
12.	39 pelajar Purwakarta Kembali ke rumah pasca-pendidikan di barak TNI	https://www.antaranews.com/berita/4841453/39-pelajar-purwakarta-kembali-ke-rumah-pasca-pendidikan-di-barak-tni	18 Mei 2025
13.	Pendidikan barak militer berpotensi langgar prinsip pemenuhan hak anak	https://www.antaranews.com/berita/4838413/pendidikan-barak-militer-berpotensi-langgar-prinsip-pemenuhan-hak-anak	16 Mei 2025
14.	Komnas HAM soal siswa bermasalah dididik TNI: Perlu ditinjau ulang	https://www.antaranews.com/berita/4809125/komnas-ham-soal-siswa-bermasalah-dididik-tni-perlu-ditinjau-ulang	2 Mei 2025
15.	Menko Muhaimin: Disiplinkan pelajar tak perlu	https://www.antaranews.com/berita/4824129/menko-muhaimin-disiplinkan-pelajar-tak-perlu-dididik-di-barak-militer	9 Mei 2025

	didik di barak militer		
16.	Wajib militer Demul dinilai berseberangan dengan konsep pedagogi	https://www.antaranews.com/berita/4805525/wajib-militer-demul-dinilai-berseberangan-dengan-konsep-pedagogi	30 April 2025
17.	PKPA sebut pembinaan anak secara militer tidak sentug akar persoalan	https://www.antaranews.com/berita/4817641/pkpa-sebut-pembinaan-anak-secara-militer-tidak-sentuh-akar-persoalan	10 Mei 2025 ¹
18.	Gubernur Lemhannas sebut Pendidikan militer bukan untuk anak nakal	https://www.antaranews.com/berita/4846857/gubernur-lemhannas-sebut-pendidikan-militer-bukan-untuk-anak-nakal	20 Mei 2025
19.	KPAI soroti belum ada SOP penyelenggaraan Pendidikan barak militer	https://www.antaranews.com/berita/4837853/kpai-soroti-belum-ada-sop-penyelenggaraan-pendidikan-barak-militer	16 Mei 2025
20.	Gubernur Jateng pilih ikuti aturan hukum ketimbang siswa di barak	https://www.antaranews.com/berita/4805713/gubernur-jateng-pilih-ikuti-aturan-hukum-ketimbang-siswa-di-barak-tni	30 April 2025

1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dilakukan menggunakan model framing Robert N. Entman dengan empat perangkat utama:

1. Define Problems (pendefinisian masalah),
2. Diagnose Causes (penyebab masalah),
3. Make Moral Judgment (penilaian moral),
4. Treatment Recommendation (saran penyelesaian).

Interpretasi data dilakukan dengan membaca secara mendalam bagaimana Antaranews membentuk konstruksi realitas isu kebijakan tersebut, kemudian menghubungkannya dengan konteks sosial-politik di Jawa Barat dan Indonesia secara umum

1.8.7. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada satu media, yakni Antaranews, sehingga hasil analisis belum dapat mewakili bagaimana framing kebijakan barak militer ditampilkan oleh media lain yang mungkin memiliki sudut pandang berbeda. Kedua, analisis hanya menggunakan pendekatan framing Robert N. Entman tanpa melakukan perbandingan dengan model framing lain, sehingga sudut pandang yang dihasilkan cenderung terbatas pada kerangka analisis tunggal. Ketiga, penelitian ini hanya mencakup pemberitaan dalam periode tertentu, sehingga temuan yang diperoleh bersifat kontekstual dan sulit digeneralisasikan pada isu serupa yang muncul di waktu berbeda atau dalam situasi politik yang lain.

1.8.8. Godness Kriteria

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan kriteria trustworthiness (Lincoln & Guba, 1985):

1. Credibility: dilakukan dengan triangulasi teori dan data untuk memastikan kebenaran interpretasi.
2. Transferability: hasil penelitian dideskripsikan secara rinci agar dapat dijadikan rujukan pada konteks penelitian lain yang relevan.

3. Dependability: proses penelitian dicatat secara sistematis sehingga dapat ditelusuri ulang.
4. Confirmability: peneliti menjaga objektivitas dengan mengacu pada data aktual dari berita Antaranews, bukan opini pribadi.